

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA
KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**



**ANGGI NUR AZIZAH
1910421147**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA
KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen

**ANGGI NUR AZIZAH
1910421147**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

ANGGI NUR AZIZAH
1910421147

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal 19 September 2023 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 19 September 2023
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

ANGGI NUR AZIZAH
1910421147

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal **19 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.	Ketua	1.
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Anggota	2.
3.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	3.
4.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Anggota	4.

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : ANGGI NUR AZIZAH
NIM : 1910421147
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 19 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Anggi Nur Azizah

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil 'aalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah peneliti sendiri, melainkan juga terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada peneliti. Oleh karena itu, ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tua peneliti terkasih dan tercinta, Ayah Jumadi dan Nurjannah yang selalu mendoakan dan memberi kasih sayang, motivasi dan semangat yang tak terhingga sehingga peneliti berada di titik ini, dan juga kepada :

1. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E, selaku ketua Program Studi Manajemen Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu Nasyirah Nurdin, S.M., M.M. selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Universitas Fajar Makassar.
5. Dr. H. Syamsuddin Bidol., M.M, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu tenaga, waktu serta fikirannya semata-mata demi mengarahkan dan membimbing peneliti selama penulisan skripsi.
6. Dr. Sri Adrianti Muin, S.E., M.Si, selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak membantu tenaga, mengarahkan dan membimbing peneliti selama proses perkuliahan.
7. Kepada Teman-teman Manajemen 05 yang telah memberikan support baik tenaga, waktu dan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga kepada Sahabatku Nurherniati S. Farm Terima kasih sudah selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan.
8. Kepada Kakak perempuanku Tersayang Fatmawati S.E, yang terlibat dalam membantu penyelesaian penyusunan Skripsi ini terima kasih sudah menjadi sosok kakak dalam segala hal, Terima kasih juga untuk Adekku

tersayang Muh Fayyad Amrullah dan Kakak Laki-lakiku tersayang Fadlianto yang selalu memberikan dukungan do'a dan juga berupa materi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membacannya.

Makassar, 19 September 2023

Anggi Nur Azizah

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

**Anggi Nur Azizah
Syamsuddin Bidol**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sumber data primer dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri key informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan perangkat desa lainnya sedangkan yang menjadi informan yaitu masyarakat desa. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan : Pada Tahap pelaksanaan (PRK) yang dilakukan pemerintah desa masih kurang transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa dikarenakan sebagian masyarakat mengaku kecewa dengan kinerja kepala desa sekarang, selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih/tidak adil dalam penyaluran bantuan bersumber dari dana desa.

Kata Kunci: Pengelolaan, dana desa, Pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN COMMUNITY EMPOWERMENT CASE STUDY IN BENTENG ALLA UTARA VILLAGE, BAROKO DISTRICT, ENREKANG REGENCY

**Anggi Nur Azizah
Syamsuddin Bidol**

The purpose of this study is to find out how village fund management in empowering village communities in Benteng Alla Utara Village, Baroko District, Enrekang Regency, focusing on Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability in accordance with applicable procedures and regulations. The source of primary data and secondary data in this study consists of key informants, namely the Village Head, Secretary, Treasurer and other village officials while the informants are village communities. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results showed At the implementation stage (PRK) carried out by the village government, there is still a lack of transparency in providing information to the community so that many people do not participate in every village activity because some people claim to be disappointed with the performance of the village head now, in addition to lack of care about the social conditions of the community, as well as favoritism / unfair in the distribution of assistance sourced from village funds.

Keywords: Management, village fund, Community empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori <i>Stewardship</i> (<i>Stewardship Theory</i>).....	8
2.2 Pengelolaan	9
2.3 Desa.....	13
2.4 Dana Desa	15
2.5 Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.6 Kerangka Berfikir	24
2.7 Tinjauan Empiris.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Definisi Operasional	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Desa Benteng Alla Utara.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Benteng Alla Utara.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Benteng Alla Utara.....	43
4.1.4 Jumlah penduduk.....	45
4.1.5 Keadaan Mata Pencarian.....	45
4.2 Hasil penelitian.....	48
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	48
4.3 Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anggaran DD perbidang Desa Benteng Alla Utara 2022	6
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk.....	45
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Benteng Alla Utara	46
Tabel 4.4 Gambaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	47
Tabel 4.5 Gambaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4.6 APBDes Desa benteng alla utara tahun 2022	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	25
Gambar 4.1 Profil Kantor Desa Benteng Alla Utara	41
Gambar 4.2 Srtuktur Organisasi	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara	71
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	80
Lampiran 3 Dokumen APBDes Benteng Alla Utara Tahun 2021-2022... .	84
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin dan Balasan Penelitian	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimulai dengan pengelolaan keuangan di tingkat federal, regional, dan lokal, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik. Pada skala terendah, Desa berperan strategis dengan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pada hakikatnya perkembangan suatu desa dapat digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa penduduk yang mendiaminya sebagai suatu kesatuan masyarakat. Desa adalah suatu badan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan dan mempunyai wewenang. Untuk mengurus rumah tangganya sendiri Pemerintah mengeluarkan Dana Desa (DD) yang ditujukan kepada Desa itu sendiri untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Masyarakat Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jaya dkk, 2020: Tambunan dkk, 2020).

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah pembangunan pedesaan. Pemerintah telah lama menerapkan berbagai langkah untuk memperkuat landasan perekonomian di daerah pedesaan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi pemerintah terlalu besar akibatnya justru membatasi kemampuan masyarakat desa untuk berkreasi dan inovatif dalam mengelola dan menjalankan perekonomian lokalnya. Hal ini mendukung anggapan bahwa banyak kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, mengenai apa

yang diinginkan dan dapat dilakukan oleh masyarakat, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pembangunan masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017:64).

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mutu hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja, menciptakan infrastruktur desa, meningkatkan potensi perekonomian daerah, dan mendorong pembangunan desa. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan (Natsir, 2017).

Melalui Dana Desa salah satu inisiatif pengembangan desa dilakukan yang salah satunya bertujuan untuk memperkuat masyarakat lokal. Dana desa sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat dan juga untuk pertumbuhan fisik. Namun pada kenyataannya, banyak desa yang mengelola keuangannya tanpa mematuhi pedoman pelaksanaan tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan pedoman dan tujuan yang diinginkan. Masyarakat secara alamiah diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan desa, sehingga desa dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemangku kepentingan ditingkat Pemerintahan Desa (PEMDES), Untuk menjamin Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, khususnya penyelenggara desa harus memiliki rasa kepemilikan terhadap pengelolaan dana daerah. prinsip dasar penyelenggaraan keuangan desa, seperti Perencanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dana, serta tugas dan tanggung jawab otoritas pengelola.

Tindakan mengawasi pelaksanaan tugas tertentu sambil meminta bantuan orang lain untuk membuat aturan dan tujuan organisasi dikenal sebagai manajemen. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan secara terbuka, akuntabel, konsultatif, metodis, dan sesuai anggaran, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, periode pengelolaan Dana Desa berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (APBD) pada tahun anggaran. Dari segi otonomi, penyaluran Uang Desa (DD) dilakukan dengan tujuan memberikan uang stimulus untuk merangsang proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dan memberdayakan masyarakat (Welan et al., 2019).

Pemberdayaan bisa dijelaskan sebagai proses Memberikan atau meningkatkan kekuasaan kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan atau kurang mampu. Seiring dengan tumbuhnya pemikiran intelektual dan budaya dalam budaya Barat, khususnya di Eropa, gagasan pemberdayaan ini pun berkembang. Setiap jenis organisasi bergantung pada manusia dalam satu atau lain cara. Karena manusia adalah sumber daya yang menggerakkan struktur organisasi, pengelolaan sumber daya sangat penting agar organisasi dapat beroperasi secara efisien (Tahir, 2018).

Pada dasarnya, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah mendukung perkembangan manusia yang autentik dan integral di dalam kelompok masyarakat yang renta, miskin, terpinggirkan, dan kurang berdaya, serta menggerakkan mereka secara sosio-ekonomis agar dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam pembangunan komunitas mereka.

Berikut adalah Anggaran Dana Desa Perbidang di Desa Benteng Alla Utara Tahun 2022 :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa perbidang

No	BELANJA	ANGGARAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.54.838.200.00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.301.561.800.00
3.	Bidang kesehatan	RP.112.598.000.00
4.	Bidang ppekerjaan umum dan penata- ruang	Rp.130.463.800.00
5.	Bidang kawasan pemukiman	Rp.58.500.000.00
6.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.123.381.000.00
7.	Bidang penanggulangan bencana alam- darurat	Rp.541.370.000.00

Sumber: Kantor Desa Benteng Alla Utara:2023.

Berdasarkan Table 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dianggarkan sebesar Rp.54.838.200.00, Bidang Pelaksanaan pembangunn desa Sebesar Rp.301.561.800.00, Bidang Kesehatan Sebesar Rp. 112.598.000.00, Bidang Pekerjaan umum dan penata ruang sebesar Rp.130.463.800.00, Bidang kawasan pemukiman sebesar Rp.58.500.000.00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp.123.381.000.00, dan Terakhir Pada Bidang penanggulangan bencana alam darurat sebesar Rp.541.370.000.00. Dapat di simpulkan bahwa Anggaran yang paling banyak di anggarkan pada Bidang penanggulangan bencana alam darurat sebesar Rp.541.370.000.00

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, dengan hasil atau kesimpulan yang berbeda-beda. Di Desa Humbia, Kecamatan Tagulandang Selatan Sitaro, Vanti I. Damar, Vecky A.J Masinambow, dan Amran T. Naukoko melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” pada tahun 2021. Temuan

penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Dana desa di desa Humbia masuk dalam kategori sangat efektif pada tahun anggaran 2015–2018 karena melebihi 100%, sedangkan untuk tahun anggaran 2019–2020 kembali melebihi 100% dan memenuhi syarat efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati, (2016) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, pengelolaan Dana Desa (DD) masih belum berjalan sesuai harapan. Banyak permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat yang masih belum dimasukkan dalam rencana pengelolaan. Rabat jalan, irigasi, dan pembangunan parit hanyalah beberapa contoh praktik pengelolaan pembangunan yang saat ini menghadapi tantangan. Kesulitan yang sering dihadapi adalah perolehan barang atau bahan karena sering kali terlambat sehingga menghambat pertumbuhan; kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa; dan keterlambatan laporan tanggapan karena kurangnya sumber daya. Pengelolaan Dana Desa oleh SDM perangkat desa yang masih *off-course* menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo.

Pada tahun 2022, Dadang Setiawan melakukan penelitian. “Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mendorong Pembangunan Fisik Desa” Menurut Perspektif Ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Lampung, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, pengelolaan penyaluran alokasi dana desa meliputi empat langkah: penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Akibat dana yang dialokasikan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang marak

dibandingkan untuk pembangunan desa, maka langkah penerimaan alokasi dana desa belum efektif. Tahap perencanaan efektif karena jadwal kerja telah terpenuhi dan kegiatan musrenbangdes desa telah terlaksana. Langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan anggaran program kerja. Tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya surat pertanggungjawaban.

Sejauh peneliti melakukan penelusuran tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat , peneliti belum menemukan kasus yang sama seperti yang ada di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Yang mana pemerintah desa masih kurang transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa dikarenakan sebagian masyarakat mengaku kecewa dengan kinerja kepala desa sekarang, selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih/tidak adil dalam penyaluran bantuan bersumber dari dana desa.

Oleh Karena Itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus diDesa Benteng Alla Utara Kabupaten Enrekang) “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut : Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Benteng Alla Utara kecamatan baroko Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa Benteng Alla Utara Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang penulis uraikan diatas maka manfaat penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, pengetahuan, tambahan wawasan, bahan perbandingan, dan bahan penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mendalami permasalahan yang sama.

2) Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi pemerintah desa di Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam mengkaji pengelolaan dana desa.

3) Secara Akademis

Secara akademis, sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitiannya tentang analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

1) Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* yang memandang manajemen sebagai pelayan (pelayan/penerima dan wali/manajer) yang akan bertindak dengan penuh kesadaran, pengertian, dan kebijaksanaan untuk keperluan organisasi, sering disebut dengan teori manajemen (*stewardship*).

Pengurus (manajer) akan mengalokasikan sumber daya, dana, dan strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan secara efektif memberikan akuntabilitas yang diperlukan untuk melaksanakan Pertanggungjawaban ini. Teori ini berpandangan bahwa aparat desa adalah pengelola (manajer) keuangan desa dan mereka bertindak dalam kapasitas ini dengan masyarakat sebagai prinsipalnya karena mereka mempunyai kewenangan hak untuk menerima pertanggungjawaban.

Teori *stewardship* mendefinisikan suatu kondisi di mana manajer kurang didorong oleh tujuan pribadi dan lebih berkonsentrasi pada menghasilkan pencapaian penting demi kepentingan organisasi. Teori ini diciptakan dengan landasan psikologis dan sosiologis, dan mendorong manajer untuk bertindak sebagai *steward* sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, perilaku *steward* tidak akan menyimpang dari organisasi karena mereka bekerja untuk memajukan tujuan bisnis (FX Anton, 2010: 66).

Demikian pula menurut Wahida (2015) menegaskan bahwa Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* didasarkan pada kepercayaan atau amanah (*trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi sektor publik adalah teori stewardship. Untuk mewujudkan hal tersebut, stewardship (manajemen/aparat pemerintah) mengerahkan seluruh keterampilan dan pengetahuannya untuk pengendalian intern yang efektif guna menghasilkan laporan informasi pengelolaan dana desa yang berkualitas dan transparan (Dewi Kusuma Wardani & Ratih Ranika Putri Utami, 2020:38).

Dari uraian diatas Penulis mengambil kesimpulan bahwa teori stewardship dapat menjadikan pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan yang akan berfungsi dan bertindak sejalan dengan kepentingan masyarakat

2.2 Pengelolaan

1) Pengertian Pengelolaan

Terjemahan kata "*management*", ke dalam bahasa Indonesia adalah "manajemen", yang dimungkinkan oleh penambahan kata pungut dalam bahasa Indonesia ke dalam istilah bahasa Inggris. Kata "manajemen" yang berarti mengatur, mengatur (pemerintahan, dll), dan mengurus (usaha, proyek, dll), berasal dari kata kerja "mengelola". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengelolaan adalah (Kbbi. Web.id, 2019):

- a. Proses, metode, dan tindakan pengelolaan.
- b. Tata cara melaksanakan tugas tertentu sambil meminta bantuan orang lain.

- c. Sebuah prosedur yang membantu dalam mengembangkan kebijakan dan tujuan organisasi.
- d. Suatu prosedur yang mengawasi semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Adisasmito (2011:21) mengartikan pengelolaan sebagai suatu proses yang melaksanakan tanggung jawab manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen menurut Handoko (2012:8) adalah proses merencanakan, memimpin, dan mengawasi usaha anggota organisasi serta menggunakan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan.

Penulis menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa manajemen adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya dan kemudian benar-benar dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

2) Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa dan dikelola berdasarkan aturan. Penatausahaan keuangan desa dilakukan secara terencana, anggaran, dan dilandasi nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi.

a. Transparan

Khususnya gagasan transparansi yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi keuangan Desa sebanyak-banyaknya.

b. Akuntabel

Pemahaman bahwa seseorang mempunyai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber

daya serta penerapan kebijakan yang terpercaya guna memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

c. Partisipatif

Secara khusus mengikutsertakan lembaga desa dan individu masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, perlu mengikuti pedoman atau regulasi yang menjadi dasarnya.

3) Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa semuanya termasuk dalam istilah “pengelolaan keuangan desa”.

Pada setiap tahapan prosedur pengelolaan keuangan desa, terdapat aturan yang harus dipahami dan dipatuhi dalam jangka waktu tertentu.

a. Perencanaan

Masyarakat desa harus dilibatkan dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa agar dapat terlaksana. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berjangka waktu enam tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mempunyai jangka waktu satu tahun, semuanya memberikan rincian tentang perencanaan dan pembangunan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun dengan berpedoman pada rencana program kegiatan desa, rencana kerja pemerintah desa.

b. Pelaksanaan

Penting untuk mengikuti pedoman tertentu ketika mengelola dana desa untuk mencegah penyalahgunaan keuangan. Misalnya, seluruh pemasukan dan pengeluaran desa harus melalui rekening Kas Desa, dan seluruh kegiatan desa harus didukung dengan dokumen yang memadai.

c. Penatausahaan

Bendahara desa menyimpan catatan administrasi keuangan desa. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran.

d. Pelaporan

Hal ini mempunyai beberapa indikator, seperti kepala desa melaporkan kepada bupati atau walikota mengenai perkembangan pelaksanaan APBDes, Laporan akhir tahun dan laporan semester pertama harus diserahkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Paling lambat bulan Januari tahun berikutnya, laporan harus sudah disampaikan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa bertanggung jawab melaporkan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan dimuat dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Yang terakhir, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis atau melalui media yang tersedia.

2.3 Desa

1) Pengertian Desa

Kata Sansekerta "dhesi", yang berarti tanah air, adalah asal kata "desa". Aspek sosiokultural suatu kota serta penampilan luarnya sebagai sebuah komunitas fisik sangat dipertimbangkan. Di negara ini, desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Mayoritas keluarga seringkali tinggal di desa-desa, yang biasanya tidak terlalu besar. Jumlah penduduk seringkali rendah karena sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Hubungan antar masyarakat biasanya baik karena jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Masyarakatnya masih memegang teguh dan menjunjung tinggi adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Istilah "desa" digunakan untuk merujuk pada fenomena global yang terjadi dimana-mana. Ini adalah komunitas kecil yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan terikat pada suatu tempat tertentu sebagai tempat tinggal (permanen) dan sumber kebutuhannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan pengertiannya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas geografis serta berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya, mengakui dan menghormati adat istiadat setempat. .

Desa-desa di Indonesia secara luas diklasifikasikan sebagai desa peternakan, perkebunan, pertanian dan nelayan. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1972 yang mengatur tentang penerapan klasifikasi dan tipologi, desa di Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan: swadaya, swakarsa, dan swasembada.

a. Desa Swadaya

Di desa miskin ini, segala kegiatan dilakukan sesuai dengan konvensi dan masih mencerminkan budaya tradisional masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat di desa ini secara umum rendah.

b. Desa Swakarsa

Hal ini menunjukkan bahwa komunitas desa telah berkembang melampaui komunitas yang mandiri dan penduduknya sudah mulai beralih dari sektor primer sebagai sumber pendapatan. Desa Mandiri Anggota masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak lagi bergantung pada adat istiadat atau pola konvensional, dan desa sudah mandiri dalam segala aspek sosial dan ekonomi.

c. Desa Swasembada

Petani masyarakat tidak lagi bergantung pada tradisi atau konvensi karena sudah mandiri dalam segala hal, baik sosial maupun ekonomi.

Dalam bukunya Otonomi Desa Tahun 2012, Widjaja H.A.W. menggambarkan desa sebagai suatu jenis masyarakat hukum yang mempunyai struktur tersendiri berdasarkan hak asal usul yang khusus. Inklusi, demokratisasi, otonomi nyata, dan pemberdayaan masyarakat merupakan cita-cita utama pemerintahan desa.

Senada dengan Zakaria yang dikutip Nurman (2015: 226), menegaskan bahwa desa adalah kumpulan orang-orang yang hidup bersama atau tempat di mana terdapat organisasi pemerintahan masyarakat yang menetapkan peraturan perundang-undangan sendiri dan dipimpin oleh orang yang dipilih. masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan sebeumnya, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sebuah entitas pemerintah lokal yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan wilayahnya sendiri. Hal ini mencakup berbagai aspek

seperti pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta fungsi-fungsi penting lainnya seperti permukiman, pedesaan, pelayanan pemerintah, layanan sosial, dan aktivitas ekonomi di dalam wilayah tersebut. Desa memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dan mengembangkan beragam aspek kehidupan masyarakatnya.

2.4 Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah uang yang diperoleh dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241 Tahun 2014. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

APBN merupakan sarana negara untuk mengakui desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dengan penggunaan dana ini, desa dapat meningkatkan pelayanan publik, menumbuhkan perekonomian, menutup kesenjangan pembangunan dengan desa, dan memperkuat komunitas lokal sebagai tujuan pembangunan. Setiap tahunnya, pemerintah memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat dalam APBN. Prioritas diberikan pada pemanfaatan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan inisiatif lokal sederhana yang bertujuan untuk pertumbuhan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, menurut Herlianto (2017:65), dana desa adalah uang yang disalurkan pemerintah melalui APBD kota atau kabupaten yang menjadi anggota

APBN dan digunakan untuk desa. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 yang harus dipatuhi untuk Pengelolaan Dana Desa.

2) Tujuan Dana Desa

Tujuan pemerintah terhadap Dana Desa tercantum di bawah ini, dan semuanya berlaku untuk setiap desa di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Buku Saku Dana Desa:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan perekonomian lokal
- d. Menutupi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memberi bobot lebih pada masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Tingkat kemiskinan.
- c. Sebuah tempat.
- d. Kesulitan geografis. Dengan begitu Transparan Jumlah dana yang didistribusikan ke setiap desa berbeda-beda.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yang memiliki dua arti yakni *to give power or authority to* yang mempunyai dua arti yaitu memberikan kekuasaan atau wewenang. pengertian yang kedua adalah pemberian kemampuan atau pemberdayaan atau kegiatan pemberian kemampuan melalui pemberdayaan, sedangkan pengertian yang pertama adalah pengalihan jabatan dan pendelegasian kebijakan kepada individu lain. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan. Dalam proses ini, masyarakat diajak untuk mengenali berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam pembangunan dan menjadi lebih mandiri, dapat menggali potensinya, serta tampil dengan jelas dalam memanfaatkannya. Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan cepat, melainkan suatu proses yang terus berlangsung dan menghasilkan perubahan secara bertahap.

Tiga langkah proses pemberdayaan adalah penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

a. Tahap Penyadaran

Sasaran utama dalam konteks ini adalah masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam media dan menyadari potensi mereka untuk meninggalkan status kemiskinan. Pada tahap ini, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat miskin bahwa pemberdayaan dimulai dari diri mereka sendiri. Selain itu,

upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa komunitas ini memiliki akses yang cukup terhadap informasi, dan dengan bantuan pendamping, proses pemberdayaan dapat dipercepat dan hasilnya dapat diukur dan dijelaskan secara lebih baik.

b. Tahap Pengkapasitasan

Tujuannya adalah untuk menyediakan alat yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Masyarakat miskin menerima pengajaran khusus pada tahap ini, dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hidup mereka yang kurang beruntung. Pada titik ini, sumber daya penting dari luar masyarakat juga diperkenalkan dan disediakan agar masyarakat dapat memenuhi keberadaan dan potensinya. Proses pemberdayaan mencakup organisasi dan sistem nilai selain memberikan dukungan kepada individu yang kurang beruntung baik secara individu maupun kolektif. Walaupun kapasitas dalam konteks sistem nilai berkaitan dengan pengaturan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam mengelola peluang, kapasitas organisasi dicapai melalui restrukturisasi organisasi pelaksana.

c. Tahap Pendayaan

Dengan berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan, masyarakat dari kelompok berpendapatan rendah dapat mengakses peluang yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara bertahap memberi mereka peran yang lebih besar sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka serta dengan mengakomodasi keinginan mereka. Selain itu mereka juga mengevaluasi keputusan mereka dan dampak dari tindakan mereka sendiri.

Menurut Nugroho, pemberdayaan adalah suatu cara melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh konsep-konsep yang diterima secara luas. dimana kebutuhan masyarakat menjadi fokus dari segala kegiatan. Alhasil, pemberdayaan tercipta dari keterlibatan masyarakat dengan bantuan pemerintah atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk mendidik kelompok masyarakat yang terorganisir (Yunus, 2017: 3).

Senada dengan hal tersebut, Mardikanto dan Soebiato menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang mencakup sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keunggulan kompetitif kelompok sosial yang lebih lemah, seperti mereka yang mengalami kemiskinan (Hamid, 2018: 3).

Meningkatkan sumber daya manusia dan berupaya memaksimalkannya merupakan dua cara untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Hal ini akan memberikan masyarakat lebih banyak kapasitas dan kemampuan untuk menggunakan potensi mereka, sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui inisiatif swadaya.

Menurut Gunawan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan sosial dimana masyarakat setempat bersatu untuk membuat rencana dan keputusan bersama dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat atau memenuhi tuntutan sosial sesuai dengan kapasitas dan sumber dayanya (Hamid, 2018: 10).

Senada dengan hal tersebut, Robert Chambers menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu gagasan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (Alfitri, 2011: 22).

Dari definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah proses mendorong individu, kelompok, atau

masyarakat untuk mengembangkan kekuatannya sendiri atau dengan kata lain kemampuan bersaing dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan mencegah permasalahan sosial, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan.

2) Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dengan mewujudkan kata “driven development” dan menerjemahkan kegiatan pertumbuhan dengan membimbing seseorang menuju pembangunan yang dipimpin oleh warga negara, seseorang dapat memberdayakan warga negara, membangun dengan pusat komunitas, dan mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Menurut Effendi, ada tiga cara untuk memberdayakan masyarakat: yaitu, *enabling*, *empowering*, dan *maintaining*.

a. *Enabling*

Untuk menjamin masyarakat dapat memiliki pengetahuan ekonomi yang berkelanjutan, maka harus diciptakan suasana yang dapat mendorong pengembangan kapasitas individu.

b. *Empowering*

Merupakan kemampuan yang dipunyai warga haruslah dikuatkan dengan mendekati pada peningkatan kompetensinya.

c. *Maintaining*

Agar dapat bersaing secara adil, tujuannya adalah untuk secara seimbang memperkuat dan menjaga kemampuan warga negara di semua bidang, seperti kegiatan perlindungan.

3) Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, atau sederhananya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan aspirasi,

pandangan mata, mata pencaharian, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan kemandirian dalam menjalankan tugas sehari-hari hanyalah beberapa contoh ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang berdaya. Pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat, khususnya bagi kelompok lemah yang lemahnya kekuasaan disebabkan oleh sebab-sebab internal (seperti persepsi mereka sendiri) atau eksternal (seperti tertindas oleh sistem sosial yang tidak adil).

Berikut beberapa maksud dan tujuan pemberdayaan tersebut menurut Sumaryadi yang dikutip oleh Rahman Mulyawan:

- a. Tujuan pemberdayaan warga negara adalah untuk mendukung pertumbuhan pribadi mereka yang kecil, miskin, petani, lemah, dan rentan. Warga negara yang berdaya secara ekonomi akan mandiri dan memiliki segala yang mereka butuhkan untuk hidup sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan masyarakat saat ini.
- b. Membuka kesadaran dan meningkatkan keterlibatan warga negara dalam pengorganisasian diri bertujuan agar individu dapat mencapai rasa kemandirian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah, miskin dan tidak mampu dalam perekonomian yang bergerak menuju swasembada. . . Pelatihan, pendidikan, pengembangan dan pendampingan merupakan cara pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan.

Dengan tahap-tahap pemberdayaan yang dilaksanakan yakni:

- 1) Pilih lokasi di mana Anda dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

- 2) Melakukan kontak sosial dengan orang-orang yang tepat untuk membangun jembatan antar warga dan pelaksanaan operasional.
- 3) Menjalin hubungan sosial dengan individu yang tepat untuk menciptakan hubungan antara penduduk setempat dan pelaksanaan operasi.

Mardikonto menyebutkan tujuan pemberdayaan warga sebagai berikut:

a. Perbaiki kelembagaan (*Better insitution*)

Dengan menerapkan perbaikan, kita ingin memodifikasi lembaga tersebut—antara lain dengan menciptakan mitra—dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang akan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Perbaiki usaha (*Better business*)

Pengembangan organisasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu yang berpartisipasi didalamnya. Ini mencakup meningkatkan kapasitas organisasi, struktur, proses, dan sumber daya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan anggota atau individu yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, organisasi dapat lebih efektif dalam melayani dan memenuhi kepentingan para partisipan

c. Perbaiki pendapatan (*Better income*)

Dalam konteks yang berbeda, pengembangan bisnis dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan kinerja bisnis sehingga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik atau meningkatkan profitabilitas. Dengan kata lain, pengembangan

bisnis bertujuan untuk merubah situasi finansial bisnis menjadi lebih positif dan menguntungkan.

d. Perbaiki lingkungan (Better environment)

Tindakan individu yang dilakukan untuk memuaskan keinginan pribadi seringkali menjadi akar permasalahan kerusakan lingkungan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang seringkali meningkatkan kualitas hidupnya. Seseorang akan lebih mungkin untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan jika mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi karena mereka biasanya memahami dampak dari aktivitas mereka terhadap lingkungan.

e. Perbaiki kehidupan (Better living)

Kesehatan, pendapatan, dan pencapaian pendidikan hanyalah beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur standar hidup seseorang. Harapannya adalah ketika pendapatan meningkat, kondisi kehidupan setiap orang akan membaik.

f. Perbaiki masyarakat (Better community)

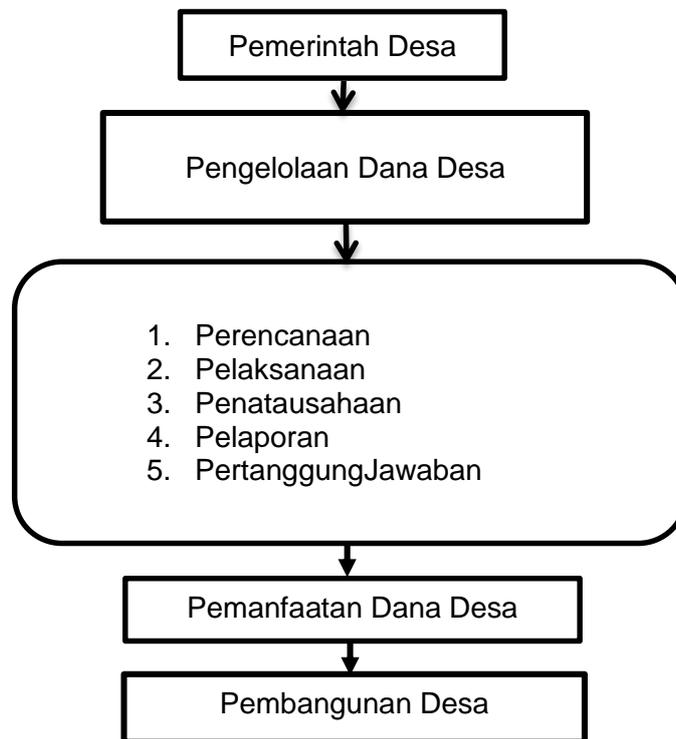
Kehidupan yang efisien sering kali dipengaruhi oleh keadaan sosial dan fisik yang menguntungkan. Ketika kondisi sosial dan lingkungan mendukung, masyarakat akan lebih mampu membangun masyarakat fungsional yang dapat terwujud ketika elemen-elemen ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan kelompok.

2.6 Kerangka Berfikir

Pemanfaatan dana desa untuk memberdayakan warga Desa Benteng Alla Utara akan dibahas dalam penelitian ini. Desa diharapkan dapat menjalankan otonominya melalui dana desa sehingga dapat berkembang dan berkembang seiring dengan pemekaran desa itu sendiri. Sedangkan tujuan dari peraturan perundang-undangan desa adalah mewujudkan masyarakat dinamis yang dapat berperan besar dalam mengatur, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa.

Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan desa, pemerintah desa harus berkonsentrasi lebih dari sekedar menyelesaikan tahap-tahap terakhir pengelolaan keuangan daerah. Penduduk desa setempat perlu terlibat aktif dalam proses pembangunan, menurut pejabat desa, untuk menjamin hasil pembangunan yang berkualitas tinggi. Khususnya, hasil pembangunan yang menguraikan tujuan, tuntutan, dan hasil dari seluruh komunitas desa terdekat yang bekerja bersama-sama. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kondisi inilah yang akan diteliti di desa Benteng Alla Utara Kabupaten Enrekang, terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Benteng Alla Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

2.7 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Tabel Tinjauan Empiris

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Vanti I. Damar, Vecky A.J Masinambow, Amran T. Naukoko, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat" Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Sitaro, 2021.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Tingkat efektivitas dana desa Humbia tahun anggaran 2015-2018 berada dalam kategori sangat efektif karena mencapai tingkat efektivitas lebih dari 100% sedangkan pada tahun anggaran 2019-2020 efektivitas dana desa mencapai 100% dan dapat dikategorikan efektif.	Sama-sama meneliti tentang dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Tempat penelitian dilakukan

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Nurul Hidayati, "Analisis Pengelolaan Dana Desa" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan DD, diantaranya 1) Dalam perencanaan pengelolaan ini masih belum melibatkan masyarakat, 2) Pengelolaan pembangunan seperti pembuatan irigasi, pembuatan talut, serta rabat jalan,	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Tempat penelitian dilakukan.

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>ini masih mengalami beberapa hambatan, hambatan yang sering dialami yaitu mengenai pengadaan barang atau material pasalnya barang tersebut sering telat sehingga menghambat pembangunan, 3) Kurangnya partisipasi dalam masyarakat terkait pembangunan Desa, 4) Keterlambatan dalam laporan pertanggung jawaban karena rendahnya</p>		

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan DD, 5) Pengelolaan DD ini masih belum tepat sasaran, ini menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo.		
3.	Dadang Setiawan, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam" Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Lampung, 2022.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari empat tahap yaitu penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Tahapan penerimaan	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Tempat penelitian dilakukan.

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>Alokasi Dana Desa belum efektif karena dana yang ada di alokasikan bukan untuk pembangunan desa melainkan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 yang sedang marak.</p> <p>Tahapan perencanaan sudah efektif karena sudah melaksanakan kegiatan musrenbang des dengan program kerja yang terlaksana.</p> <p>Tahapan pelaksanaan atas program</p>		

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>kerja berupa pembangunan fisik dan non fisik sudah terealisasi anggaran. Tahapan pertanggung jawaban berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya surat pertanggung jawaban.</p>		
4.	<p>Theodorus Palit, Frans Singkoh, Neni Kumayas, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow" Sam Ratulangi, 2018.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat terlihat kurangnya perhatian dan penganggarnya</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.</p>	<p>Tempat penelitian dilakukan.</p>

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan.		
5.	Majjon Kinaro, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar" Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas, Banda Aceh, 2019.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Tempat penelitian dilakukan.

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat. diharapkan dapat meningkatkan tahapan perencanaan dan pelaksanaan dengan lebih baik lagi pemerintah melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.</p>		

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk lebih memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, penelitian kualitatif menggambarkan realitas sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam konteks ilmiah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Untuk memungkinkan adanya pendekatan langsung di lapangan, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada kejadian deskriptif dalam kondisi terkendali atau dalam keadaan alamiahnya. Peneliti dapat menjelaskan dan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan pada umumnya dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini tanpa menggunakan rekayasa apapun. Penjelasan yang metodis, menyeluruh, dan tepat mengenai fakta-fakta dari suatu fenomena yang terjadi di lapangan adalah apa yang ingin dicapai oleh penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat menggali informasi secara menyeluruh dan mendalam dari sumber-sumber penelitian tentang analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Benteng Alla Utara kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

3.2 Definisi Operasional

a. Pengelolaan

Pengelolaan adalah berbagai pekerjaan atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan berbagai tugas guna mencapai tujuan tertentu.

b. Desa

Desa merupakan representasi dan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada. Hal ini telah berkembang bersama masyarakat Indonesia dan telah menjadi komponen integral dari cara hidup negara.

c. Dana Desa

Dana Desa adalah uang yang diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Operasional pemerintahan daerah, serta inisiatif pembangunan, perbaikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, didukung oleh dana ini.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Kekuasaan, yang juga berarti kekuatan atau kapasitas, adalah asal mula kata "pemberdayaan". Selain itu, perencanaan, prosedur, dan upaya untuk mendukung atau memberdayakan kelompok lemah digambarkan sebagai pemberdayaan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan agustus 2023.

3.4 Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari mana data dapat diperoleh. Ada dua sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh data tersebut, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan peneliti akses terhadap data secara langsung untuk kebutuhan penelitian. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah memberdayakan masyarakat dengan dana desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber tambahan yang berkaitan erat dengan sumber utama dan dapat berupa jurnal, buku dan skripsi tentang subjek materi yang ditulis orang lain. Berdasarkan uraian sumber data sekunder yang diberikan di atas, jelas bahwa sumber data sekunder adalah tulisan dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini yang memberikan data tambahan atau pendukung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Di Desa Benteng Alla' Utara, Kabupaten Enrekang, peneliti mengumpulkan data yang objektif dan valid mengenai analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah teknik ilmiah menjadi landasan untuk mengembangkan jawaban atas kesulitan-kesulitan tersebut. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Observasi

Dengan melihat dan mendokumentasikan fenomena secara metodis yang dijadikan objek observasi, seseorang dapat mengumpulkan informasi melalui observasi. Temuan dari penelitian tersebut adalah peneliti mengamati langsung objek di Kantor Desa Benteng Alla' Utara Kabupaten Enrekang yang diteliti guna mendapatkan informasi langsung dari kegiatan yang peneliti amati. Berdasarkan pengamatan saya, masih kurangnya transparansi dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa (PRK), sehingga banyak warga yang tidak bisa mengikuti kegiatan desa karena tidak puas dengan kinerja kepala desa saat ini. Selain itu, kurangnya kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat dan pilih kasih/ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan.

b) Wawancara

Obrolan dengan tujuan yang jelas adalah wawancara. Pewawancara mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai menjawab dengan jawaban. Dua orang terlibat dalam dialog. Wawancara adalah percakapan dua pihak yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber.

Peneliti mewawancarai berbagai pihak masyarakat desa di Desa Benteng Alla' Utara dengan menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara pewawancara dengan informan atau narasumber. Proses ini digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian ini. Buku catatan dan alat perekam merupakan perlengkapan wawancara.

c) Dokumentasi

Mempelajari peristiwa sejarah dikenal dengan istilah dokumentasi. Dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data untuk penyelidikan ini. Dokumentasi adalah proses pemeriksaan catatan publik yang diperoleh dari sumber seperti buku, catatan, berita acara, rekaman, internet, peraturan perundang-undangan, dan arsip resmi.

Catatan Peristiwa yang sudah berlalu dikenal dengan sebutan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Dokumentasi adalah analisis dokumen publik seperti buku, memo, notulen, rekaman, internet, peraturan perundang-undangan, dan arsip resmi.

dokumentasi terhadap sesuatu, yang dapat berupa teks, gambar, atau hasil karya seni seseorang. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data kualitatif, dan banyak fakta dan data yang disimpan dalam bahan dokumentasi seperti surat, buku harian, arsip, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data Sesuai dengan penekanan penelitiannya, pendekatan analisis data dalam penelitian

kualitatif melibatkan pengklasifikasian atau pengkategorian data berdasarkan beberapa tema. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

c. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dan dituangkan ke dalam laporan atau data rinci dikenal dengan istilah reduksi data. Laporan yang dibuat menggunakan data yang telah dikumpulkan, diminimalkan, dirangkum, dan difokuskan pada informasi yang paling signifikan. Gambaran yang lebih jelas mengenai hasil observasi akan diberikan dengan menganalisis dan mengorganisasikan data berdasarkan unit konsep, tema, dan kategori tertentu, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

d. Penyajian Data

Data disajikan dalam format matriks dan disusun berdasarkan isu utama, sehingga memudahkan peneliti menemukan pola hubungan antar kumpulan data yang berbeda.

Peneliti akan cukup mudah memahami apa yang terjadi selama penelitian dengan menggunakan pendekatan penyajian data. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana kerja berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama tahap penelitian. Pengumpulan data yang telah disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang sangat penting disebut dengan penyajian data.

e. Kesimpulan Akhir

Di dalam teknik penarikan kesimpulan ini merupakan perkembangan dari reduksi data hingga penyajian data. Proses menarik kesimpulan melibatkan upaya menjelaskan data yang dikumpulkan dan pemahaman peneliti. Oleh karena itu, informasi yang telah diringkas dan

disajikan secara cermat di sini akan kami simpulkan sementara. Temuan-temuan yang dicapai pada tahap awal biasanya tidak dianggap cukup jelas, namun pada tahap-tahap selanjutnya temuan-temuan tersebut akan menjadi lebih kokoh dan mempunyai dasar yang kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambar 4.1 Desa Benteng Alla Utara



Sumber:Desa *Benteng Alla Utara*(2023)

4.1.1 Sejarah Desa Benteng Alla Utara.

Salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada ketinggian 500–1750 meter di atas permukaan laut adalah Desa Benteng Alla Utara. Pada masa konflik dengan penjajah Belanda pada tahun 1905, Benteng Alla berkembang menjadi benteng pertahanan dan benteng masyarakat Baroko. Karena kawasan Benteng Alla Utara berbatasan langsung dengan wilayah Toraja, maka aktivitas perdagangan didukung oleh akses terhadap pasar tradisional yang mudah diakses di wilayah Toraja sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar penduduk di berbagai kabupaten. Wilayah purba yang disebut tanah Lixisol meliputi Desa Benteng Alla Utara. podzolik.

keberadaan perkebunan rakyat di enrekang mulai dikenal sebagai penghasil kopi sejak 1750. Adapun batas wilayah Desa Benteng Alla Utara yaitu :

- a) Sebelah Utara ditingkatkan dengan Lembang Kaduaja Kabupaten Tana Toraja.
- b) Sebelah Barat ditingkatkan dengan Lembang Rano Timur Kabupaten Tana Toraja;
- c) Sebelah Timur diperluas dengan desa Patongloan Kecamatan Baroko;
- d) Sebelah Selatan diperluas dengan desa Tongko kecamatan Baroko

Desa Benteng Alla Utara memiliki jarak tempuh 9,8 km dari kecamatan Ibukota dan 53 km dari Ibukota Kabupaten. Jumlah Dusun terdiri dari 6 Dusun yaitu:

- 1) To'Uwe,
- 2) Lo'ko Tolemo,
- 3) Rodo-Rodo,
- 4) Tangsa,
- 5) Alla
- 6) Lo'ko Bulan

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa Benteng Alla Utara

a) Visi

“Menjadikan Desa Benteng Alla Utara Wilayah yang bermartabat, nyaman, aman dan sejahtera dalam kemajemukan”

b) Misi

1. Memberdayakan seluruh potensi desa, khususnya sumber daya manusia untuk mengelola dengan baik sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Benteng Alla Utara guna mencapai kemajuan
2. Menjaga hubungan solidaritas antar sesama umat beragama, serta berlaku adil kepada semua masyarakat Desa Benteng Alla Utara
3. Mengelola lahan pertanian secara profesional
4. Melestarikan budaya yang ada di Desa Benteng Alla Utara

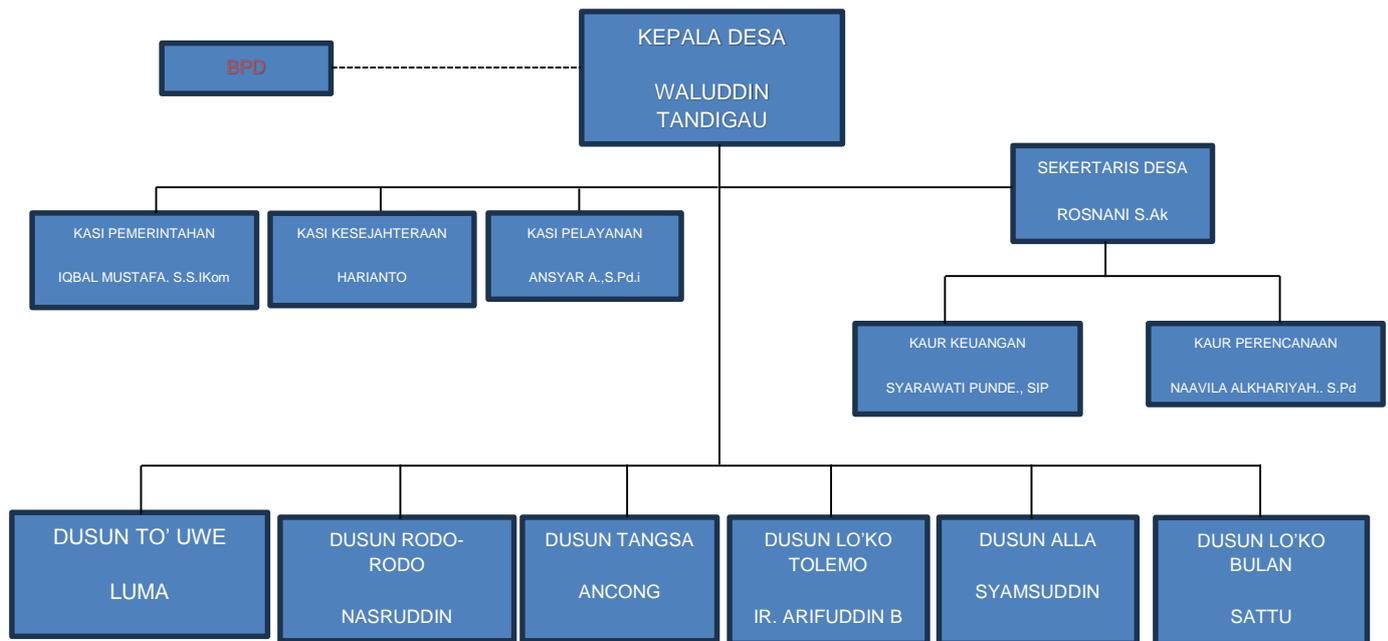
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Benteng Alla Utara

Struktur organisasi dibuat untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas yang diperlukan ketika banyak orang bekerja sama untuk mencapai tujuan berbeda dalam organisasi yang sama. Orang-orang yang membentuk suatu organisasi harus bekerja sama, mengintegrasikan, atau mengkoordinasikan berbagai tugas agar berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, mengetahui segala tindakan yang akan dilakukan merupakan hal pertama yang harus dilakukan agar kerjasama dapat berjalan efektif.

Khususnya pada pemerintahan desa Benteng Alla Utara kecamatan Baroko kabupaten Enrekang dimana struktur ini dijadikan wadah dalam melaksanakan tugas/wewenang dan tanggung jawabnya, suatu organisasi yang menggambarkan kerangka pengaturan tanggung jawab masing-masing pihak. diharapkan memperoleh manfaat efektif

dalam hubungan kerjasama dari aspek kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Gambaran organisasi pemerintahan Desa Benteng Alla Utara sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi Desa Benteng Alla Utara



Sumber: Kantor Desa Benteng Alla Utara (2023).

4.1.4 Jumlah penduduk

Menurut statistik dari kantor Desa Benteng Alla Utara, Penduduk yang tinggal di desa Benteng Alla Utara pada tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Benteng Alla Utara

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	644 KK
2.	Jumlah Laki-Laki	1.143 Jiwa
3.	Jumlah Perempuan	1.122 Jiwa
4.	Jumlah janda	49 Jiwa
5.	Jumlah Duda	35 Jiwa
6.	Jumlah Anak Yatim	26 Jiwa
7.	Jumlah Fakir Miskin	75 Jiwa

Sumber: Desa Benteng Alla Utara, (2023).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Benteng Alla Utara berdasarkan kepala keluarganya berjumlah 644 KK, Laki-Laki berjumlah 1,143 jiwa, Perempuan Berjumlah 1,122 Jiwa, Janda berjumlah 49 Jiwa, Duda Berjumlah 35 Jiwa, anak yatim berjumlah 26 Jiwa dan fakir miskin berjumlah 75 Jiwa.

4.1.5 Keadaan Mata Pencarian

Terlihat dari ambang batas perekonomian masyarakat secara keseluruhan yang membedakan masyarakat yang mempunyai perekonomian lemah, sedang, dan tinggi sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuninya, maka tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari pendapatan dana devisa. mereka gunakan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi di Desa Benteng Alla Utara. Tabel di bawah ini berisi rincian pekerjaan yang mereka lakukan:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Benteng Alla Utara

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	580 Orang
2.	Buruh Tani	65 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	350 Orang
4.	Dokter Swasta	2 Orang
5.	Bidan Swasta	10 Orang
6.	Perawat Swasta	15 Orang
7.	Peternak	450 Orang
8.	Pedagang Keliling	2 Orang
9.	Pedagang Sayur	30 Orang
10.	Tukang Jahit	10 Orang
11.	Tukang Kue	8 Orang
12.	Tukang Bakso	1 Orang
13.	Pemilik Usaha Perikanan	1 Orang
14.	Pemilik Usaha Brilink	7 Orang
15.	Montir	4 Orang
Total		1.527 Orang

Sumber:Desa Benteng Alla Utara,(2023)

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa mata pencaharian Masyarakat Desa Benteng Alla Utara berbagai macam, seperti: Petani berjumlah 580 Orang, Buruh tani berjumlah 65 Orang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 350 Orang, Dokter Swasta berjumlah 2 Orang, Bidan Swasta berjumlah 3 Orang, Perawat Swasta Berjumlah 15 Orang, Peternak Berjumlah 450 Orang, Pedagang Keliling berjumlah 2 Orang, Pedagang Sayur Berjumlah 30 Orang, Tukang Jahit berjumlah 10 Orang, Tukang Kue 8 Orang, Tukang Bakso Berjumlah 1 Orang, Pemilik Usaha Perikanan berjumlah 1 Orang, Pemilik Usaha Brilink berjumlah 7 Orang dan yang terakhir Montir berjumlah 4 Orang.

Tabel 4.3
Gambaran jumlah penduduk Berdasarkan agama di desa
benteng alla utara

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	ISLAM	1.000 JIWA	1.150 JIWA	2.150
2.	KRISTEN	80 JIWA	105 JIWA	185
3.	KATOLIK	8 JIWA	10 JIWA	18
JUMLAH				2.353

Sumber:Desa Benteng Alla Utara(2023).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Benteng Alla Utara lebih banyak memeluk agama islam dari pada kristen dan katolik. Hal ini disebabkan karena penduduk asli desa benteng alla utara memeluk agama islam sedangkan masyarakat yang memeluk agama kristen dan katolik merupakan orang pendatang yang menikah dengan masyarakat desa benteng alla utara dan menetap di desa tersebut.

Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan di desa benteng alla utara tahun 2023.

Tabel 4.4
Gambaran Jumlah Penduduk Desa Benteng Alla Utara Berdasarkan
pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	75
2.	SD	180
3.	SMP	295
4.	MTS	79
5.	SMA	250
6.	SMK	140
7.	AKADEMI/D3	50
8.	SARJANA	350
	JUMALAH	1.419

Sumber:Kantor Desa Benteng Alla Utara(2023).

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan Mahasiswa lebih banyak Sebanyak 180 Sarjana, sedangkan penduduk yang berlatar belakang Akademi/D3 Lebih sedikit sebesar 50 D3.

4.2 Hasil penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah Desa Benteng Alla Utara dan juga masyarakat Desa Benteng Alla Utara.

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Manajemen adalah suatu bentuk tindakan yang dapat dilakukan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya.

Untuk mencapai tujuan bersama, manajemen mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang telah direncanakan sebelumnya dan kemudian dilaksanakan.

Berikut adalah implementai pengelolaan APBDes tahun 2022 di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.2

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Benteng Alla Utara Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Lebih/(KURANG)
4.	PENDAPATAN			
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.021.151.000.00	Rp. 1.021.151.000.00	
4.2.1	DANA DESA	Rp. 1.021.151.000.00	Rp. 1.021.151.000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.021.151.000.00	Rp. 1.021.151.000.00	
5.	BELANJA			
0.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 54.838.200.00	Rp. 45.297.000.00	Rp. 9.541.200.00
01.03	Administrasi Kependudukan Pencatatan	Rp. 54.838.200.00	Rp. 45.297.000.00	Rp. 9.541.200.00
	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran	Rp. 46.681.000.00	Rp. 37.867.000.00	Rp. 8.814.000.00
	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa	Rp. 8.157.200.00	Rp. 7.430.000.00	Rp. 727.200.00
0.2	Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 301.561.800.00	Rp. 249.765.000.00	Rp. 51.796.800.00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 112.598.000.00	Rp. 62.220.000.00	Rp. 50.378.000.00
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tamu)	Rp. 36.000.000.00	Rp. 36.000.000.00	
	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	Rp. 1.500.000.00	Rp. 1.500.000.00	
	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp. 54.518.000.00	Rp. 5.440.000.00	Rp. 49.078.000.00
	Belanja modal sarana/prasarana posyandu	Rp. 20.580.000.00	Rp. 19.280.000.00	Rp. 1.300.000.00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penata ruang	Rp. 130.463.800.00	Rp. 129.864.000.00	Rp. 599.800.00
	Belanja Modal perintis jalan Lo'ko Tolemo	Rp. 38.039.800.00	Rp. 37.995.000.00	Rp. 44.800.00
	Belanja Modal Pengkerasan jalan tani tangsa-bangkawan	Rp. 92.424.000.00	Rp. 91.869.000.00	Rp. 555.000.00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 58.500.000.00	Rp. 57.681.000.00	Rp. 819.000.00
	Belanja modal pembangunan Jamban RTM	Rp. 58.500.000.00	Rp. 57.681.000.00	Rp. 819.000.00
0.4	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 123.381.000.00	Rp. 113.441.000.00	Rp. 9.940.000.00
	Belanja bantuan penguatan ketahanan	Rp. 121.391.000.00	Rp. 111.601.000.00	Rp. 9.790.000.00
	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Rp. 1.990.000.00	Rp. 1.840.000.00	Rp. 150.000.00
0.5	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam Darurat	Rp. 541.370.000.00	Rp. 511.200.000.00	Rp. 30.170.000.00
0.5.1	Penanggulangan Bencana	Rp. 30.170.000.00		Rp. 30.170.000.00
0.5.3	Belanja Keadaan Mendesak (BLT)	Rp. 511.200.000.00	Rp. 511.200.000.00	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.021.151.000.00	Rp. 919.703.000.00	Rp. 101.448.000.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)		Rp. 101.448.000.00	(Rp. 101.448.000.00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan pembiayaan	Rp. 108.224.000.00	Rp. 108.224.000.00	
6.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	Rp. 108.224.000.00	Rp. 108.224.000.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 106.365.000.00	(Rp. 106.365.000.00)
	Belanja perintisan jalan tani dusun Lo'ko Tolemo		Rp. 41.635.000.00	
	Belanja pembangunan jembatan		Rp. 64.730.000.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 108.224.000.00	Rp. 1.859.000.00	Rp. 106.365.000.00
	SISA LEBIH / (KURANG)	Rp. 108.224.000.00	Rp. 103.307.000.00	Rp. 4.917.000.00

Sumber: APBDes Pemerintah Desa Benteng Alla Utara 2022.

Berdasarkan tabel APBDes Desa Benteng Alla Utara diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Belanja dianggarkan sebesar RP.1.021.151.000.00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.021.151.000.00, kemudian anggaran belanja desa yang pertama dianggarkan sebesar RP.1.021.151.000.00 dan direalisasikan sebesar Rp.919.703.000.00 maka Terdapat sisa lebih sebesar Rp.101.448.000.00. Jika disimpulkan maka anggaran pendapatan dan belanja telah mengalami kenaikan.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan setiap tahap kegiatan tidak lepas dari pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan tersebut dapat berupa swadaya maupun gotong royong masyarakat dan kerjasama timbal balik. Selain itu, dapat juga berupa kerjasama yang erat antara masyarakat dan pelaksana.

Adapun pengelolaan Dana Desa pada Desa Benteng Alla Utara terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Untuk mencapai maksud dan tujuan program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan meliputi penyiapan segala kebutuhan yang diperlukan, mempertimbangkan secara matang segala kendala yang ada, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa di desa Benteng Alla Utara sesuai dengan harapan.

rencana kegiatan partisipatif dibuat sebagai bagian dari kegiatan perencanaan, dan anggaran Dana Desa ditetapkan berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Desa (DRK). DRK sendiri diputuskan melalui Musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh bapak Waluddin Tandigau selaku kepala desa Benteng Alla Utara yang mengatakan bahwa:

“Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa terlebih dahulu kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pada saat ingin dilaksanakannya musrenbangdes kepala dusun melakukan rapat penduduk kemudian rapat bersama kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan APBDes, nanti pada saat musrenbangdes ditawarkan kepada masyarakat apa yang ingin dilaksanakan.” (Hasil Wawancara dengan bapak Waluddin Tandigau pada tanggal 19 Agustus 2023).

Begitupula disampaikan oleh Ibu Rosnani SE selaku sekretaris Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Iya jadi di awal januari itu kita bikin namanya musyawarah desa setelah itu kita bikin Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tiap tahun, dan itulah yang akan direncanakan dan dilaksanakan di tahun berjalan, tapi kita juga harus mengacu pada RPJM jadi kapan tidak ada dalam RPJM itu tidak boleh kita laksanakan, jadi RPJM itulah yang dipilah-pilah mana yang menurut kita skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang kita tuangkan dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dalam jangka satu tahun, dari RKPDesa itulah kita buat dokumen dalam bentuk APBDes dalam tahun itu.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Rosnani SE pada tanggal 19 Agustus 2023).

Begitupula disampaikan oleh Ibu Syahrawati Punde,SP selaku bendahara Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Pada awal tahun tepatnya dibulan januari kita membuat musyawarah desa lalu kita membuat rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) setiap tahunnya tapi kita harus tetap ikut dengan RPJM dan memilih apa saja yang lebih dibutuhkan masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Syahrawati Punde,SP pada tanggal 19 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, rencana kerja dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Benteng Alla Utara dilaksanakan dengan cara adanya Musrenbangdes atau forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi

masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Kepala Desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Karena mencakup pelaksanaan seluruh rencana kegiatan yang telah disahkan oleh musrenbangdes, pelaksanaan merupakan bagian terbesar dari operasional Dana Desa. Tindakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang disebut dengan eksekusi atau pelaksanaan. Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan yang direncanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat yang didanai APBDes. Salah satu wujud fisik tim pelaksana Desa Benteng Alla Utara. Bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam keputusan kebijakan, baik yang berasal dari sektor publik maupun swasta. Masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat mengenai pelaksanaan rencana kegiatan yang dibuat oleh perangkat Desa Benteng Alla Utara. Kurangnya keterbukaan informasi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pemerintah desa pada awalnya tidak membagikan informasi atau meminta keterlibatan masyarakat sebelum menetapkan rencana kegiatan. Salah satu penyebab rendahnya dukungan masyarakat desa terhadap inisiatif pembangunan adalah masalah ini.

Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Deli Panannangan selaku anggota masyarakat Desa Benteng Alla Utara yang mengatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari desa.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Deli Panannangan pada tanggal 20 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Nurjamilah selaku anggota masyarakat Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Iya betul nak, Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjamilah pada tanggal 20 Agustus 2023).

Begitupula juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Bapak Saipul selaku anggota masyarakat Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Betul, kita tidak ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena kita kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.” (Hasil Wawancara dengan bapak Saipul pada tanggal 20 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih Kurang transparan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang enggan mengikuti kegiatan desa. Selain kurang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat, juga sejumlah warga mengaku kecewa dengan kinerja kepala desa saat ini.

c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan oleh bendahara desa dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku di setiap akhir bulan. Selanjutnya, bendahara desa harus melakukan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban

yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya. Penatausahaan keuangan desa ini dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Syahrawati Punde,SP selaku bendahara Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, saya selaku bendahara desa tentunya bertugas mencatat uang masuk dan keluar dalam buku kas desa. Jika ada transaksi melalui bank tentu ada keterangannya di buku bank desa.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Syahrawati Punde,SP pada tanggal 19 Agustus 2023).

Begitupula disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Bapak Ansyar A..S.Pd,I selaku Kasi Pelayanan Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Setelah Penatausahaan jelas semua pembangunan itu kemudian diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40% pertama, kemudian setelah sudah keluar dana tersebut kadang ada yang diambil untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ansyar A..S.Pd,I pada tanggal 19 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Bapak Harianto selaku Kasi Kesejahteraan Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Penatausahaan ini sudah pake komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Nanti setelah diambil uang kemudian diliat tanggal berapa uang itu diambil, terus untuk keperluan apa uang itu diambil dan kemudian uang yang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika komputer error data itu masih ada.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Harianto pada tanggal 19 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, penatausahaan yang dilakukan kepala desa, sekertaris desa dan

bendahara desa Benteng Alla Utara telah sesuai aturan yang berlaku, antara lain setiap penerimaan yang disetorkan ke rekening kas desa dan pengeluaran dilakukan pencatatan ke dalam buku kas desa oleh Bendahara desa didukung dengan dokumentasi berupa nota barang/jasa.

d. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pelaksanaan keuangan berupa realisasi pelaksanaan APBDesa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Pada akhir bulan Juli tahun berjalan, kepala desa harus melaporkan pelaksanaan APBDesa semester pertama. Laporan akhir semester harus diserahkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi program/kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014).

Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh bapak Waluddin Tandigau selaku kepala desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Dalam hal pelaporan dana desa, kepala desa atau sering juga diwakilkan oleh sekertaris desa melaporkan pertanggungjawaban terkait program dan desa yang sudah dijalankan dalam bentuk laporan yang lengkap kepada camat dan nanti selanjutnya camat akan melaporkan pertanggungjawaban tersebut ke pemerintah kabupaten.” (Hasil Wawancara dengan bapak Waluddin Tandigau pada tanggal 19 Agustus 2023).

Begitupula disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Rosnani SE selaku sekertaris Desa Benteng Alla Utara mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan, dan kalau laporan dana desa itu terangkum dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kami

laporkan setiap tahunnya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Rosnani SE pada tanggal 19 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah Desa Benteng Alla Utara melakukan pelaporannya secara bertahap. Kewenangan desa selanjutnya harus menyertakan buku laporan realisasi Dana Desa pada setiap pencairan Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBK) yang disampaikan kepada DPM melalui camat juga memuat laporan realisasi Dana Desa

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Pemerintah desa menerapkan konsep akuntabilitas dengan menerapkan akuntabilitas pada setiap kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kegiatan pekerjaan fisik yang diawasi oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diperintahkan oleh Kepala Desa. TPK mempertanggungjawabkan pekerjaan yang ditangani dari awal sampai dengan selesainya pekerjaan secara swakelola dan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya sehingga keuangan desa hanya beredar di dalam desa.

Tahapan pertanggungjawaban dimana pemerintah desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) efektif dalam menyelesaikan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko. Pihak berwenang dan masyarakat bekerja sama melakukan pengawasan terhadap Dana Desa dan kegiatan yang menyertainya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Apabila terjadi penyimpangan aturan atau penyalahgunaan dana

desa, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan Dana Desa harus diperhatikan dalam pengawasan pelaksanaannya baik peran, tanggung jawab, dan akuntabilitasnya.

Sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Syahrawati Punde,SP selaku bendahara desa Benteng Alla Utara mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengatakan bahwa:

“Kualitas SDM pemerintah Desa Benteng Alla Utara ini memang masih tergolong rendah, namun hal ini bisa ditingkatkan melalui pelatihan yang sering diadakan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga kami bisa lebih mengetahui tugas dan tanggungjawab kami selaku orang-orang yang dipercaya untuk mengelola anggaran Dana Desa ini. Jadi semua tahap kami yang mengerjakan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.”(Hasil Wawancara dengan Ibu Syahrawati Punde,SP pada tanggal 19 Agustus 2023 di kantor Desa Benteng Alla Utara).

Begitupula, sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh bapak Waluddin Tandigau selaku kepala desa Benteng Alla Utara mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengatakan bahwa:

“Desa Benteng Alla Utara ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Benteng Alla Utara juga selalu diterima oleh pemerintah kabupaten.” (Hasil Wawancara dengan bapak Waluddin Tandigau pada tanggal 19 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Rosnani SE selaku sekertaris desa Benteng Alla Utara mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengatakan bahwa:

“Kalau laporannya itu struktural artinya desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke kecamatan kemudian kecamatan melapor ke Kabupaten jadi tidak langsung desa melapor ke Bupati.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Rosnani SE pada tanggal 19 Agustus 2023).

Begitupula, sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Ibu Nurjamilah selaku anggota masyarakat Benteng Alla Utara mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Benteng Alla Utara tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Benteng Alla Utara ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di Desa atau tidak.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Nurjamilah pada tanggal 20 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan dalam kutipan wawancara berikut oleh Bapak Saipul selaku anggota masyarakat Benteng Alla Utara mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Benteng Alla Utara ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Benteng Alla Utara ini.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Saipul pada tanggal 20 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa tahapan Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benteng Alla Utara dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten sedangkan evaluasi kegiatan dengan warga desa tidak dilakukan Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benteng Alla Utara dapat dikatakan kurang efektif.

4.3 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan. Diskusi digunakan untuk menguji data. Sehubungan dengan hal tersebut, kini peneliti akan membahas bagaimana pengelolaan dana desa untuk oemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Perencanaan meliputi mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan, mempertimbangkan secara cermat setiap potensi hambatan, dan menyusun metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program dana desa di desa Benteng Alla Utara agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program. sesuai dengan harapan. Rencana kegiatan partisipatif dibuat sebagai bagian dari kegiatan perencanaan, dan anggaran Dana Desa ditetapkan berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Desa (DRK). DRK sendiri diputuskan melalui Musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa Benteng Alla Utara Sudah maksimal karena pemerintah desa melakukan pelaporannya secara bertahap. Kewenangan desa menyertakan buku laporan realisasi Dana Desa pada setiap pencairan Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBK) yang disampaikan kepada DPM melalui camat juga memuat laporan realisasi Dana Desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

pelaksanaan merupakan mayoritas operasional Dana Desa. Karena menyangkut realisasi seluruh rencana kegiatan yang telah disetujui dalam musrenbangdes, Tindakan yang diambil oleh masyarakat atau pihak berwenang, organisasi publik atau swasta, atau keduanya, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditunjukkan dalam pilihan kebijakan disebut sebagai implementasi. Masih kurangnya keterbukaan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat ketika perangkat Desa Benteng Alla Utara

melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan. Kurangnya keterbukaan informasi yang menjadi permasalahan adalah bahwa pemerintah desa pada awalnya tidak membagikan informasi atau meminta keterlibatan masyarakat sebelum menetapkan rencana kegiatan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap inisiatif pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana di Desa Benteng Alla Utara masih belum maksimal karena rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masih belum transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan desa karena ada yang mengaku kecewa. dan tidak puas dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.

c. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Bendahara desa membidangi administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Buku kas umum digunakan untuk administrasi oleh bendahara desa, yang ditutup pada setiap akhir tahun. bulan setelah mendokumentasikan seluruh penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, kepala desa harus mendapatkan laporan pertanggungjawaban bulanan dari bendahara yang merinci bagaimana kinerja keuangan desa. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank terkait digunakan untuk mengelola urusan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Penatausahaan pengelolaan dana desa dikatakan sudah maksimal karena telah sesuai aturan yng berlaku, antara lain setiap penerimaan yang

disetorkan ke rekening kas desadan pengeluaran dilakukan pencatatan ke dalam buku kas desa oleh bendahara desa didukung dengan dokumentasi berupa nota barang/jasa.

d. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pelaksanaan keuangan berupa realisasi pelaksanaan APB Desa berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Pada akhir bulan Juli tahun berjalan, kepala desa harus melaporkan pelaksanaan APB Desa semester pertama. Laporan semester terakhir tahun berjalan diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi program/kegiatan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014).

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada Tahap pelaporan pengelolaan dana desa benteng alla utara dikatakan belum maksimal karena dalam hal pelaporan masyarakat tidak diberikan fasilitas papan pengumuman atau media sejenisnya untuk mengetahui alokasi dana desa dipergunakan untuk apa saja. Masyarakat mengetahui hasil tersebut melalui DPM yang akan menyampaikan kepada masyarakat.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara

Dengan mengemban tanggung jawab pada setiap kegiatan, maka pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan yang ada, misalnya kegiatan pekerjaan fisik yang dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), maka pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tanggung jawab pengelolaan desa. dana. Yang telah diperintahkan oleh kepala desa. TPK mempertanggungjawabkan pekerjaan yang ditangani dari awal sampai dengan selesainya pekerjaan secara swakelola dan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjaannya sehingga keuangan desa hanya beredar di dalam desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa benteng alla utara dikatakan belum maksimal karena walaupun secara administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Benteng Alla Utara dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dilakukan hanya kepada pemerintah kabupaten sedangkan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa tidak dilakukan. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benteng Alla Utara dapat dikatakan kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Benteng Alla Utara. Berdasarkan Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Pengelolaan dana Desa di Desa Benteng Alla Utara dikatakan sudah maksimal karena melakukan pelaporannya secara bertahap Pemerintah desa juga telah mencantumkan buku laporan realisasi Dana Desa pada setiap pengeluaran Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung (APBK) yang disampaikan kepada DPM melalui camat juga memuat laporan realisasi Dana Desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa benteng alla utara dikatakan belum maksimal karena pelaksanaan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang transparan, sehingga mengakibatkan Banyak warga yang memilih tidak mengikuti kegiatan desa apa pun karena ada yang mengaku kecewa dan tidak menyukai kinerja kepala desa. Pengabaian pemerintah desa terhadap keadaan sosial masyarakat disertai dengan prasangka dan ketidakadilan dalam pemberian bantuan yang berasal dari desa.
3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Benteng Alla Utara. Dikatakan sudah maksimal karena telah sesuai aturan yang berlaku, antara lain setiap penerimaan yang disetorkan ke rekening kas desa dan pengeluaran dilakukan pencatatan ke dalam buku kas desa oleh Bendahara desa didukung dengan dokumentasi berupa nota barang/jasa.

4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Benteng Alla Utara ini dikatakan belum maksimal karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap papan pengumuman atau alat pelaporan serupa lainnya untuk mengetahui bagaimana dana desa dialokasikan. Masyarakat mengetahui hasil tersebut melalui DPM yang akan menyampaikan kepada masyarakat.
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Benteng Alla Utara. Ini dikatakan masih kurang maksimal karena tidak dilakukan evaluasi operasional LPJ dengan warga sekitar, dan LPJ hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Benteng Alla Utara kurang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan Hasil penelitian dan kesimpulan tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat studi kasus di Desa Benteng Alla Utara maka peneliti dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

1. Kepada pemerintah Desa Benteng Alla Utara harus terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan menambahkan fasilitas papan pengumuman agar masyarakat mengetahui aliran dana yang diterima desa akan dialokasikan untuk aktivitas apa saja, pemerintah desa juga dalam menjalankan program penyaluran bantuan yang bersumber dari desa harus secara merata, adil, dan tepat sasaran. agar masyarakat merasa adil dalam program tersebut.
2. Kepada warga Desa Benteng Alla Utara agar menyarankan program-program yang ramah masyarakat, seperti inisiatif pemberdayaan

masyarakat melalui usaha wirausaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih mempunyai kekurangan yang perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Kurangnya kedalaman penelitian yang penulis lakukan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell John W, *“Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi Ketiga”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hamid Hendrawati, *“Manajemen Pemberdayaan Masyarakat”* Makassar: De La Macca, 2018.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomom* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Husen Syamsier, *Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, Surabaya: Pustaka Media Press, 2019.
- Indrawati Sri Mulyani, *Dalam Tujuan Dana Desa Untuk Mensejahterakan Rakyat ,Buku Saku Dana Desa* Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.
- Maryani Dedeh dan Nainggolan Ruth Roselin E, *“Pemberdayaan Masyarakat,”* Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2019.
- Mulyawan Rahman, *“Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan,”* Bandung: UNPAD Press, 2016.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saibani A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.
- Siagian. P Sondang, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta cv, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2019.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Umar Sidiq, *“Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Wibawa Samodra, *Politik Perumusan Kebijakan Publik* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Yunus Saifuddin dan Fadli Suadi, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Jurnal dan Skripsi

Abidin dan Zainal Muhammad, *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015, Vol. 6 No. 1, hlm 61-76.

Alfianto, *"Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur"* Skripsi Palopo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN, 2020, hlm 25.

Antou Putri & dkk, *"Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara"* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2019, Vol.19, No. 2, hlm 133.

Ardiansyah Malik Farhan, *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Melalui Program Desa Wisata Di Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*, Skripsi Jember: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri, 2023, hlm 2.

Boedijono, G Wicaksono, & al, Y et Puspita, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2019 Vol. 4 No.1, hlm 9-20.

Damar I. Vanti & dkk, *"Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro,"* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2021, Vol. 21, No. 3.

Fitri Sholihatul, *"Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik"*, Skripsi Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Ekonomi, 2019, hlm 37.

Hidayati Nurul, *"Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo,"* Skripsi Ponorogo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.

Husna Asmaul, *"Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Banda Aceh,"* Skripsi Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN, 2020, hlm 22.

Kawatu Freddy dan Kambey Anita, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa SEA Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Manado: Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2021, Vol. 2, No. 2, hlm 252.

Kinaro Maijon, *"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar,"* Skripsi Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas, 2019.

- Masihad Abu, *“Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa”* Skripsi Walisongo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri, 2018, hlm 37-43.
- Ni'mah Alfiatun, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata,”* Skripsi Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN, 2019, hlm 22-23.
- Nurdiani Nina, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,* Comtech, 2014, Vol 5, No.2, hlmn11-13.
- Nursetyawan Dwi Latif Muhammad, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata,”* Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm 14.
- PalitT heodorus & dkk, *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow,”* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan EKSEKUTIF, 2018, Vol.1, No.1.
- Rahum Abu, *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”* Jurnal Pemerintahan, 2015, Vol. 3, No. 4, hlm 2.
- Rindi Arma Tyas, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata,”* Skripsi Perpustakaan IAIN Metro, 2019, hlm 11.
- Setiawan Dadang, *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam,”* Skripsi Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas, 2022.
- Sintia Dwi Elin, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam,* Skripsi Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019, hlm 1.
- Sulastri Nova, *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wotopute Kabupaten Muna”* Skripsi Kendari: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, 2016, hlm 8.

Internet

- AsasPengelolaan Dana Desa, di unduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>, pada tanggal 20 April 2023.
- Darson, *“Efektivitas Pengelolan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Pada Desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna”* diunduh dari <https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/4>, pada tanggal 20 April 2023.
- Yunika Fopi & dkk, *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tanjung Medang Kecamatan*

Kelekar Kabupaten Muara Enim” diunduh dari <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi>, pada tanggal 20 April 2023.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Biodata Peneliti

Nama : Anggi Nur Azizah
Tempat, Tanggal lahir : Toraja, 02 Mei 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Buntu Lepong
No. HP : 085934544697
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Syariah
Email : angginuraziza20@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

- SD N Inpres 1 Koya Barat
- SMP NEGERI 5 Alla
- SMA NEGERI 3 ALLA.

Lampiran 2 (Pedoman Wawancara)**PEDOMAN WAWANCARA**

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

1. Wawancara dengan kepala desa benteng alla utara dan perangkat desa**lainnya:**

- a) Bagaimanakah proses perencanaan pengelolaan dana desa?
- b) Bagaimana mekanisme atau bentuk tahap pelaksanaan anggaran dana desa ini?
- c) Bagaimanakah bentuk pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa Benteng Alla Utara?
- d) Bagaimana sistem dan prosedur Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di desa benteng alla utara?
- e) Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa benteng alla utara?

2. Wawancara dengan Masyarakat Desa Beneng Alla Utara.

- a) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?
- b) Apakah sering dilakukan sosialisasi yang mampu mendorong masyarakat untuk diberdayakan?
- c) Apakah menurut Bapak/Ibu sejauh ini pihak aparatur desa sudah adil dalam program pemberdayaan penyaluran Bantuan Baik berupa BLT, PKH dan lain-lain?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Waluddin Tandigau

Jabatan : Kepala Desa

Tempat Pelaksanaan Wawancara : Kantor Desa Benteng Alla Utara

1) Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa benteng alla utara?

Jawaban: Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terlebih dahulu kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pada saat ingin dilaksanakannya musrenbangdes kepala dusun melakukan rapat penduduk kemudian rapat bersama kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan APBDes, nanti pada saat musrenbangdes ditawarkan kepada masyarakat apa yang ingin dilaksanakan

2) Bagaimanakah bentuk pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa Benteng Alla Utara?

Jawaban: Dalam hal pelaporan dana desa, saya selaku kepala desa atau sering juga diwakilkan oleh sekretaris saya untuk melaporkan pertanggungjawaban terkait program dana desa yang sudah dijalankan dalam bentuk laporan yang lengkap kepada camat dan nanti selanjutnya camat akan melaporkan pertanggungjawaban tersebut ke pemerintah kabupaten.

3) Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa benteng alla utara?

Jawaban: dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Desa Benteng Alla Utara kami selaku pemerintah desa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Benteng Alla Utara juga selalu diterima oleh pemerintah kabupaten.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Rosnani S.E
Jabatan : Sekertaris Desa
Tempat Pelaksanaan Wawancara : Desa Benteng Alla Utara

1.) Bagaimanakah proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban: jadi di awal januari itu yang pertama kami membuat musyawarah desa setelah itu melakukan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tiap tahun, dan itulah yang akan direncanakan dan dilaksanakan di tahun berjalan, tapi kami juga harus mengacu pada RPJM jadi kapan tidak ada dalam RPJM itu tidak boleh kami laksanakan, jadi RPJM itulah yang dipilah-pilah mana yang skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang kami tuangkan dalam RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dalam jangka satu tahun, dari RKPDesa itulah kami buat dokumen dalam bentuk APBDes dalam tahun itu.

2.) Bagaimanakah bentuk pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa Benteng Alla Utara?

Jawaban: Untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan, dan kalau laporan dana desa itu terangkum dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kami laporkan setiap tahunnya.

3.) Bagaimana sistem prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa benteng alla utara?

Jawaban: Pertama kami selaku aparat desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke kecamatan kemudian kecamatan melapor ke Kabupaten jadi tidak langsung desa melapor ke Bupati.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Syahawati Punde S.P
Jabatan : Bendahara Desa
Tempat Pelaksanaan Wawancara : Kantor Desa Benteng Alla Utara

1) Bagaimanakah proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban: jadi Pada awal tahun itu tepatnya dibulan januari kami selaku aparat desa membuat musyawarah desa lalu kami membuat rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) setiap tahunnya tapi harus tetap ikut dengan RPJM dan memilih apa saja yang lebih dibutuhkan masyarakat.

2) Bagaiman sistem dan prosedur Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di desa benteng alla utara?

Jawaban: Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, saya sebagai bendahara desa tentunya bertugas mencatat uang masuk dan keluar dalam buku kas desa. Jika ada transaksi melalui bank tentu ada keterangannya di buku bank desa.

3) Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa benteng alla utara?

Jawaban: Pemerintah kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Benteng Alla Utara yang masih tergolong minim. sehingga kami selaku aparat desa dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab kami sebagai penanggung jawab pengawasan operasional keuangan Dana Desa. Untuk melakukan hal ini, kami mengerjakan semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ansyar A., S.Pd,I,
Jabatan : Kasi Pelayanan
Tempat Pelaksanaan wawancara : Kantor Desa Benteng Alla Utara

1) Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa benteng alla utara?

Jawaban: Setelah Penatausahaan jelas semua pembangunan itu kemudian diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40% pertama, kemudian setelah udah keluar dan tersebut kadang ada yang diambil untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Harianto
Jabatan : Kasi Kesejahteraan
Tempat Pelaksanaan Wawancara : Desa Benteng Alla Utara

- 1) Bagaimana sistem dan prosedur Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di desa benteng alla utara?**

Jawaban: Penatausahaan ini sudah pake komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Nanti setelah diambil uang kemudian diliat tanggal berapa uang itu diambil, terus untuk keperluan apa uang itu diambil dan kemudian uang yang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika komputer error data itu masih ada

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ibu Yuliana Deli panannangan (WARGA 1)
Pekerjaan : Petani
Tempat Pelaksanaan Wawancara : Buntu Dama

1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?

Jawaban : Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nurjamilah (Warga 2)
Pekerjaan : Petani
Tempat pelaksanaan wawancara : Buntu Lepong

- 1) **Apakah menurut Bapak/Ibu sejauh ini pihak aparaturnya sudah adil dalam program pemberdayaan penyaluran Bantuan yang bersumber dari desa**

Jawaban : sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja kepala desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa

- 2) **Apakah sering dilakukan sosialisasi yang mampu mendorong masyarakat untuk diberdayakan?**

Jawaban : Pemerintah Desa Benteng Alla Utara tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Benteng Alla Utara ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di Desa atau tidak

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Saipul (Warga 3)
Pekerjaan : Petani
Tempat Pelaksanaan Wawancara : Batu To'ke

- 1) Apakah sering dilakukan sosialisasi yang mampu mendorong masyarakat untuk diberdayakan?**

Jawaban: Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Benteng Alla Utara ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Benteng Ala Utara ini.

Lampiran 2 (Dokumentasi Lapangan)

Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Bapak Waluddin Tandigau Selaku Kepala Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Ibu Syahrawati Punde,SP Selaku Bendahara Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Ibu Yuliana Deli Panannangan Selaku Anggota Masyarakat Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Ibu Nurjamilah Selaku Anggota Masyarakat Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Bapak Saipul Selaku Anggota Masyarakat Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi Kantor Desa Benteng Alla Utara



Dokumentasi di Kantor Desa Benteng Alla Utara.



Lampiran 3 (Dokumen Data Anggaran Pendapatan Belanja Desa Benteng Alla Utara) tahun 2022

Microsoft Excel interface showing the budget report for Benteng Alla Utara village in 2022. The report is titled "LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA BENTENG ALLA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022".

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.021.151.000	1.021.151.000	-
4.2.1	Dana Desa	1.021.151.000	1.021.151.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.021.151.000	1.021.151.000	-
5	BELANJA			
0.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	54.838.200	45.297.000	9.541.200
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan	54.838.200	45.297.000	9.541.200
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Pro	46.681.000	37.867.000	8.814.000
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa S	8.157.200	-	-
0.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	301.561.800	7.430.000	727.200
02.02	Sub Bidang Kesehatan	112.598.000	249.765.000	51.796.800
	Penyelenggaraan Posyandu(Makanan Tan	36.000.000	62.220.000	50.378.000
	Penyulhan Dan Pelatihan Bidang Keseha	1.500.000	36.000.000	-
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000	1.500.000	-
	Belanja Modal Sarana/Prasarana Posyand	54.518.000	5.440.000	49.078.000
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan	20.590.000	19.280.000	1.300.000
	Penata Ruang	130.463.800	129.864.000	599.800
	Belanja Modal Perintisan Jalan Dusun	38.039.800	37.995.000	44.800
	Lo'ko Tolemo			

Continuation of the budget report, showing the remaining budget items and financial summary.

	Belanja Modal Perintisan Jalan Dusun	38.039.800	37.995.000	44.800
	Lo'ko Tolemo			
	Belanja Modal Perkerasan Jalan Tani	92.424.000	91.869.000	555.000
	Tangsa - Bangkawan			
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	58.500.000	57.681.000	819.000
	Belanja Modal Pembangunan Jamban	58.500.000	57.681.000	819.000
	RTM			
0.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.381.000	113.441.000	9.940.000
	Belanja Bantuan Penguatan Ketahanan P	121.391.000	111.601.000	9.790.000
	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	1.990.000	1.840.000	150.000
0.5	Bidang Penanggulangan Bencana Alam	541.370.000	511.200.000	30.170.000
	Darurat			
0.5.1	Penanggulangan Bencana	30.170.000	-	30.170.000
0.5.3	Belanja Keadaan Mendesak (BLT)	511.200.000	511.200.000	-
	JUMLAH BELANJA	1.021.151.000	919.703.000	101.448.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	-	101.448.000	(101.448.000)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	108.224.000	108.224.000	-
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya(Penanggu	108.224.000	108.224.000	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	106.365.000	(106.365.000)
	Belanja Perintisan Jalan Tani Dusun Lo'ko Tolemo	-	41.635.000	-
	Belanja Pembangunan Jembatan	-	64.730.000	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	108.224.000	1.859.000	106.365.000
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN A	108.224.000	103.307.000	4.917.000

Dokumen Data Anggaran Desa Benteng Alla Utara Tahun 2021

REALISASI Manual AD

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Clipboard Font Alignment

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

L74

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PERMERINTAH DESA BENTENG ALLA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer			
4.2.1	Dana Desa	1.149.174.000	1.149.174.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.149.174.000	1.149.174.000	-
5	BELANJA			
0.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	52.036.000	46.086.000	5.950.000
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan S			
5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.036.000	46.086.000	5.950.000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	52.036.000	46.086.000	5.950.000
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16.171.000	10.221.000	
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	733.000	733.000	
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.128.000	4.128.000	
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	10.710.000	4.760.000	5.950.000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	600.000	600.000	
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000	1.500.000	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	1.500.000	
		33.000.000	33.000.000	

Dana Desa Tahap 1 add tahap 1 Dana Desa Tahap 2 add tahap 2 Dana D

Page 1

24	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	1.500.000	-
25	5.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	33.000.000	33.000.000	-
26	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	33.000.000	33.000.000	-
27	5.2.2.05	Belanja Jasa Langganan Internet	1.365.000	1.365.000	-
28	0.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	846.358.000	770.474.000	75.884.000
29	02.01	Sub Bidang Pendidikan			
30		Belanja Modal Pembangunan WC Paud Jabal Nu	18.388.800	18.040.000	348.800
31	02.02	Sub Bidang Kesehatan	18.388.800	18.040.000	348.800
32		Penyelenggaraan Posyandu(Makanan Tambaha	144.583.920	70.106.000	74.477.920
33		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.000.000	22.500.000	4.500.000
34		Belanja Modal Lanjutan Posyandu Tangsa	74.083.920	5.245.000	68.838.920
35	02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	43.500.000	42.361.000	1.139.000
36		Belanja Modal Rabat Beton Jln. Serang Kaok-Buntu Dama	573.385.280	572.328.000	1.057.280
37		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani To'Uwe -Tangsa	259.206.000	259.206.000	
38		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani Lo'ko Bulan - Palisu Padang	113.336.000	113.336.000	
39		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani To'Bosso - Pemanukan	83.628.000	83.628.000	
40		Belanja Modal Permtisan Jalan Dusun To'Uwe	51.155.000	51.155.000	
			61.239.280	60.382.000	857.280

Dana Desa Tahap 1 add tahap 1 Dana Desa Tahap 2 add tahap 2 Dana D

REALISASI Manual ADD d

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard Font Alignment

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

G50 : X ✓ f_x =G14+G28+G44+G46+G48

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
35	02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang				573.385.280	572.328.000	1.057.280		
36		Belanja Modal Rabat Beton Jln. Serang Kaok-Buntu Dama				259.206.000	259.206.000	-		
37		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani To'Uwe - Tangsa				113.336.000	113.336.000	-		
38		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani Lo'ko Bulan - Palisu Padang				83.628.000	83.628.000	-		
39		Belanja Modal Perkerasan Jln. Tani To'Bosso - Pemanukan				51.155.000	51.155.000	-		
40		Belanja Modal Perintisan Jalan Dusun To'Uwe				61.239.280	60.382.000	857.280		
41		Belanja Modal Galian Saluran To'Uwe - Alla				4.821.000	4.621.000	200.000		
42		Sub Bidang Kawasan Pemukiman				110.000.000	110.000.000	-		
43		Belanja Modal Pembangunan Jamban RTM				110.000.000	110.000.000	-		
44	0.3	Bidang Pembinaan Kemastarakatan				17.850.000	-	17.850.000		
45		Belanja Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa				17.850.000	-	17.850.000		
46	0.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				3.330.000	2.590.000	740.000		
47		Pelatihan/Bimtek Kelompok Tani				3.330.000	2.590.000	740.000		
48	0.5	Bidang Penanggulangan Bencana Alam Darurat				201.600.000	193.800.000	7.800.000		
49	0.5.2	Belanja Keadaan Mendesak (BLT)				201.600.000	193.800.000	7.800.000		
50		JUMLAH BELANJA				1.121.174.000	1.012.950.000	108.224.000		
51		SURPLUS / (DEFISIT)				28.000.000	136.224.000	(108.224.000)		

Dana Desa Tahap 1 add tahap 1 Dana Desa Tahap 2 add tahap 2 Dana Des

READY

Lampiran. 4 Surat Permohonan Izin dan Balasan Penelitian



Nomor : 0934/B/DFEIS-UNIFA/VII/2023
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

KEPADA YTH,
KANTOR DESA
DI-

DESA BENTENG ALLA UTARA, KECAMATAN BAROKO, KABUPATEN ENREKANG

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud mengadakan penelitian serangkaian dengan penulisan skripsi yang diprogramkan pada semester Genap tahun akademik 2022/2023. Sehubungan dengan maksud tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin/kesempatan kepada mahasiswa:

NAMA	: ANGGI NUR AZIZAH
N I M	: 1910421147
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN
JENJANG PROGRAM	: STRATA SATU (S1)
KONSENTRASI	: MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BENTENG ALLA UTARA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

Berikut Data-Data Yang Dibutuhkan, Antara Lain:

- Data Dana Desa
- Laporan Keuangan Desa
- Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Hal Yang Dianggap Penting Untuk Membantu Penelitian Tsb.

Demikian Permohonan Kami, Atas Bantuan

Dan Kerjasama Yang Baik Disampaikan terima kasih.



Makassar, 31 Juli 2023
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Dekan,

Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN: 0925096902

Tembusan:

1. Ketua Prodi Manajemen
2. Peninggal
3. Kontak Person: ANGGI NUR AZIZAH (0859-3454-4697)

Surat Balasan Penelitian di Kantor Desa Benteng Alla Utara


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BAROKO
DESA BENTENG ALLA UTARA
Alamat : Jln Poros Buntu Dama – To uwe

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 468.1/02/SKMP-DBAU/KBO/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: WALUDDIN TANDIGAU
Jabatan	: Kepala Desa
Alamat	: To uwe Dusun To uwe Desa Benteng Alla Utara

Dengan ini, menerangkan bahwa:

Nama	: ANGGI NUR AZIZAH
Tempat/Tgl. Lahir	: Toraja, 02 Mei 2001
NIM	: 1910421147
Jenjang Program	: Manajemen
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan Syariah
Alamat	: Buntu Lepong Dusun To uwe Desa Benteng Alla Utara

Benar telah melakukan penelitian di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko serangkaian dengan penulisan skripsi yang diprogramkan pada semester Genap tahun akademik 2022/2023. Dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Benteng Alla Utara Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

To’uwe, 04 September 2023
Kepala Desa Benteng Alla Utara


WALUDDIN TANDIGAU